Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 2, Maret 2025, P 470-478
e-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15063556

Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat

Dian Herdiana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai kebijakan Makan Bergizi Gratis yang dilihat dari perspektif faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis antara lain yaitu faktor kepemimpinan yang baik, dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, serta baiknya penerima masyarakat sasaran, sedangkan faktor-faktor penghambat antar lain yaitu aturan yang belum komprehensif, rantai distribusi makanan yang kaku, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kebijakan makan bergizi gratis antara lain yaitu dorongan penyusunan aturan yang komprehensif, konsistensi pelaksanaan kebijakan, operasionalisasi aturan teknis yang lebih jelas dan rinci, sampai dengan perlunya membangun kolaborasi multi aktor yang lebih luas dan berkelanjutan.
Kata kunci: *Faktor Pendorong dan Penghambat, Implementasi Kebijakan, Makan Bergizi Gratis.*

Abstract

This article analyzes the Free Nutritious Meal policy from the perspective of factors that encourage and inhibit the implementation of this policy. The approach used is descriptive qualitative using secondary data sources. The results of the analysis revealed that the driving factors for the implementation of the Free Nutritious Meal policy include good leadership, support from local governments and educational institutions, and good acceptance by the target group, while inhibiting factors include regulations that are not yet comprehensive, rigid food distribution chains, and a system of supervision and community involvement that is not yet optimal. Policy recommendations for improving the free nutritious meal policy include encouraging comprehensive regulations, consistent policy implementation, clearer and more detailed operationalization of technical regulations, and the need to build broader and more sustainable multi-actor collaboration.
Keywords: *Encouraging and Inhibiting Factors, Policy Implementation, Free Nutritious Meals.*

Article Info
Received date: 10 Maret 2025 *Revised date: 17 Maret 2025* *Accepted date: 20 March 2025*

PENDAHULUAN

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan ini digagas saat masa kampanye pemilihan presiden tahun 2024 yang mana tujuannya memberikan peningkatan kualitas gizi bagi anak-anak (Fajri, 2024; Mawangi, 2025). Kebijakan MBG dilandasi oleh kondisi anak-anak di Indonesia yang masih dihadapkan pada permasalahan malnutrisi dan *stunting*, khususnya pada kelompok masyarakat menengah dan bawah. Implikasi dari permasalahan malnutrisi dan *stunting* tidak hanya kepada kualitas kesehatan anak-anak yang memiliki kecenderungan adanya hambatan perkembangan tubuh dan kognitif yang akan mempengaruhi aktivitas keseharian anak-anak, tetapi juga akan terakumulasi menjadi permasalahan bangsa yang mana kualitas sumber daya manusia Indonesia akan sulit berkembang dan bersaing dengan bangsa lainnya (Kemdikbud RI, 2025; Purwowidhu, 2025; Sarjito, 2025).Kebijakan MBG diharapkan tidak hanya mampu menurunkan angka malnutrisi dan *stunting* anak-anak, tetapi juga mampu memastikan kecukupan gizi bagi anak-anak sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (Desiani & Syafiq, 2025). Lebih lanjut kebijakan MBG memiliki peluang untuk dapat menciptakan kesempatan yang sama bagi anak untuk memperoleh akses terhadap makan bergizi yang akan berimplikasi pada pengurangan ketimpangan sosial, anak-anak dari keluarga kurang mampu akan memiliki kualitas makanan yang bergizi yang sama dengan anak yang berasal dari kalangan keluarga mampu, sehingga akan berdampak secara langsung pada kualitas perkembangan anak yang lebih baik secara merata dan

menjadi investasi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang (Achmad et al., 2025; Andin et al., 2025; Imanuel, 2025; Rahman, 2025).

Kebijakan MBG tengah dilaksanakan oleh Pemerintah di berbagai daerah, sekalipun belum mencakup keseluruhan anak-anak yang ada di seluruh wilayah Indonesia, namun pelaksanaan kebijakan MBG ini secara umum dapat terlaksana. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kebijakan MBG yang mana kebijakan strategis yang diambil pemerintah mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran akan menentukan keberhasilan dari kebijakan MBG (Aji, 2025; Saptati, 2025). Pemerintah daerah selaku institusi di tingkat lokal juga memiliki peran yang penting dalam mendukung pelaksanaan MBG, pemerintah daerah harus mampu memastikan adanya identifikasi kebutuhan makanan bergizi gratis di wilayahnya masing-masing dan mampu memastikan adanya distribusi makanan bergizi secara merata dan tepat sasaran. Dukungan dari elemen masyarakat juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dan menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan MBG (Kementerian Sekretariat Negara, 2025; Ulya & Prabowo, 2025).

Uraian tersebut diatas mengonstruksikan pemahaman akan pentingnya mengkaji pelaksanaan kebijakan MBG tidak hanya untuk mendeskripsikan perwujudan program pemerintah yang ditunjukkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memastikan adanya dukungan semua pihak akan keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Didasarkan pada hal tersebut diatas, maka artikel ini ditujukan guna menggambarkan secara lebih rinci mengenai pelaksanaan kebijakan MBG yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dilihat dari faktor-faktor pendorong dan penghambat, sehingga akan terlihat bagaimana kompleksitas pelaksanaan kebijakan MBG. Lebih lanjut, dengan adanya uraian faktor-faktor pendorong dan penghambat dari implementasi kebijakan MBG ini diharapkan akan mampu dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk dapat menerapkan kebijakan MBG yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana penggunaan pendekatan ini ditunjukkan guna menggali informasi yang relevan terkait topik kebijakan MBG secara lebih mendalam dalam bentuk narasi kata-kata, bukan dalam bentuk sajian hitungan statistik. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang mana data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen seperti buku, artikel jurnal, dokumen dan data relevan lainnya, termasuk penggunaan data yang bersumber dari internet yang merujuk pada laman web dari institusi kredibel atau dari pemberitaan yang akurat, sehingga sajian data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi *real* yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis dalam artikel ini akan dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian utama, yaitu: Pertama, faktor-faktor pendorong pelaksanaan kebijakan MBG. Kedua, faktor-faktor penghambat kebijakan MBG. Ketiga, rekomendasi kebijakan MBG di masa yang akan datang. Ketiga kajian tersebut secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Faktor-Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan MBG

Implementasi kebijakan MBG yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini menjadi perwujudan akan komitmen untuk meningkatkan mutu gizi anak-anak yang akan berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan anak-anak. Terdapat banyak faktor pendorong pelaksanaan kebijakan MBG, beberapa diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, faktor kepemimpinan. Makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang dijanjikan pada saat kampanye Pemilihan Presiden tahun 2024, ketika terpilih maka Presiden Prabowo merealisasikan janji kampanye tersebut menjadi kebijakan MBG. Posisi Presiden Prabowo sebagai pimpinan memiliki peran yang penting dan strategis dalam pelaksanaan kebijakan MBG, sehingga faktor kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam kebijakan MBG.

Kepemimpinan Presiden Prabowo dilihat dari 4 (empat) aspek kemampuan pemimpin yaitu kemampuan menghasilkan gagasan, kemampuan mewujudkan gagasan, kemampuan memimpin

birokrasi dan kemampuan menggerakkan aktor lain, maka keempat kemampuan tersebut dimiliki Presiden Prabowo yang dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

Kemampuan menghasilkan gagasan. Makan bergizi gratis digagas oleh kandidat presiden Prabowo dalam kampanye Pemilihan Presiden tahun 2024. Gagasan ini dapat dianggap gagasan baru mengingat di Indonesia belum ada presiden yang memiliki gagasan yang serupa, dengan begitu sosok Presiden Prabowo sebagai pemimpin telah mampu menghasilkan gagasan guna menjalankan kepemimpinannya.

Kemampuan mewujudkan gagasan. Terealisasinya janji kampanye yang kemudian dituangkan dalam bentuk Kebijakan MBG merupakan kemampuan Presiden Prabowo untuk mewujudkan gagasan ke dalam bentuk kebijakan, sehingga hal ini menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo telah mampu mewujudkan gagasan-gagasan dalam bentuk kebijakan yang berdampak bagi masyarakat luas.

Kemampuan memimpin birokrasi. Presiden merupakan jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan yang ada di Indonesia, dalam konteks kepemimpinan maka presiden harus mampu memimpin birokrasi beserta dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan MBG secara langsung melibatkan birokrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terlaksananya kebijakan MBG menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo telah mampu memimpin dan menggerakkan birokrasi untuk berperan dalam pelaksanaan kebijakan MBG sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Kemampuan menggerakkan aktor lain. Terlaksananya kebijakan MBG yang melibatkan berbagai pihak baik seperti dari unsur pemerintah, swasta dan unsur masyarakat menunjukkan bahwa Presiden Prabowo dapat menggerakkan aktor lain untuk turut aktif dan berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan kebijakan MBG sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing, dengan begitu maka kemampuan menggerakkan aktor lain sudah mampu dilaksanakan oleh Presiden Prabowo.

Kedua, faktor kondisi lingkungan politik yang mendukung. Pemerintahan Presiden Prabowo didukung oleh partai koalisi yang disebut dengan KIM Plus yang terdiri dari lebih 10 partai politik dengan presentasi 81.03% suara di DPR yang mana hal ini secara kuantitas menjadi kekuatan yang besar dalam sistem politik Indonesia saat ini (Soehandoko, 2024). Adanya koalisi pendukung pemerintah ini memberikan keuntungan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah termasuk didalamnya kebijakan MBG yang mana seluruh partai yang bergabung di koalisi KIM Plus mendukung kebijakan MBG. Didasarkan kepada hal tersebut maka lingkungan politik yang mayoritasnya merupakan pendukung pemerintah menjadi faktor pendorong terlaksananya kebijakan MBG, sehingga kebijakan terebut dapat terlaksana di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Ketiga, faktor dukungan anggaran. Implementasi kebijakan tidak akan terselenggara tanpa adanya dukungan anggaran, termasuk didalamnya kebijakan MBG yang mana hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan kebijakan MBG untuk diimplementasikan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Anggaran untuk tahun 2025 bagi pelaksanaan kebijakan MBG sebesar 171 trilliun (Amani, 2025), meskipun dalam tahun pertama anggaran MBG tidak mampu mencakup pembiayaan implementasi kebijakan MBG bagi seluruh anak di Indonesia, namun adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran lebih dari 100 trilliun sudah mencukupi bagi terlaksananya kebijakan MBG menjadi salah satu faktor pendorong terlaksananya kebijakan MBG di berbagai daerah.

Keempat, faktor dukungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai organisasi publik di tingkat daerah secara umum menerima kebijakan MBG sebagai inisiasi kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kecukupan gizi anak-anak yang ada di daerahnya masing-masing. Bahkan Pemerintah Daerah menunjukkan komitmennya untuk menyukseskan kebijakan MBG dengan mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kebijakan MBG (Dirgantara & Carina, 2025b; Suryanis, 2025). Dengan demikian pemerintah daerah tidak hanya menjadi faktor yang mendorong terlaksananya kebijakan MBG di daerahnya masing-masing, tetapi juga menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBG sampai dengan saat ini.

Kelima, faktor dukungan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai pilar utama dalam terlaksananya kebijakan MBG dapat menerima kebijakan MBG sebagai upaya untuk memberikan peningkatan gizi bagi anak-anak yang ada di lembaganya masing-masing (Corebima, 2025; Reyaan, 2025). Sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh swasta menerima dengan baik, tidak diketemukan sekolah sebagai lembaga pendidikan menolak kebijakan MBG yang digulirkan oleh pemerintah. Berdasarkan pada hal tersebut maka lembaga pendidikan di berbagai daerah

mendukung kebijakan MBG dan menjadi salah satu faktor yang mendorong terlaksananya kebijakan MBG.

Keenam, faktor dukungan masyarakat. Masyarakat secara umum menerima kebijakan MBG dengan baik, terutama bagi masyarakat sasaran yaitu anak-anak di berbagai sekolah yang sudah ditentukan sebagai lokasi implementasi kebijakan MBG. Meskipun tidak menutup mata bahwa kebijakan MBG menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat (Irfani, 2025) , namun tidak sampai mengganggu bagi terlaksananya kebijakan MBG dan masyarakat mendukung terlaksananya kebijakan MBG tersebut.

Anak-anak sebagai subjek dari kebijakan MBG menerima dengan baik sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kecukupan gizi bagi anak-anak yang akan berdampak bagi tumbuh kembang anak-anak. Dengan begitu adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan MBG menjadi faktor pendorong terhadap terlaksananya kebijakan MBG di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Keenam faktor sebagaimana dijelaskan tersebut diatas menjadi pendorong terlaksananya kebijakan MBG saat ini, faktor-faktor ini perlu dipertahankan di masa yang akan datang agar sasaran dan tujuan dari kebijakan MBG dapat terwujud, sehingga tidak hanya akan menciptakan pemenuhan gizi yang baik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan MBG

Implementasi kebijakan MBG yang tengah dilaksanakan pemerintah di berbagai daerah tidak luput dari faktor-faktor penghambat. Hal ini secara substantif dan secara teknis mengganggu kelancaran pelaksanaan kebijakan MBG, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan MBG antara lain dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan MBG

No	Aspek	Masalah	Uraian
1.	Pemerintah	Belum komprehensifnya peraturan yang mengatur MBG	Belum adanya peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan daerah dan peraturan desa yang mengatur MBG secara sinergis dan berkesinambungan.
		Hubungan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah	Belum tertatanya secara jelas bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, serta mekanisme kolaborasi dan koordinasinya.
		Alokasi dan distribusi anggaran	Belum jelasnya seperti apa hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, mekanisme seperti apa ketika APBD digunakan sebagai anggaran MBG beserta dengan besaran jumlah alokasi anggarannya.
		Kolaborasi multi aktor	Belum jelasnya bagaimana upaya membangun kolaborasi multi aktor antara pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, NGO dan masyarakat luas.
2.	Pelaksanaan	Pemetaan wilayah	Proses pemetaan sekolah yang menjadi sasaran kebijakan MBG dasar pertimbangannya belum rinci, sehingga sekolah di beberapa daerah yang memang layak untuk mendapatkan makanan bergizi gratis belum termasuk ke dalam sekolah sasaran.

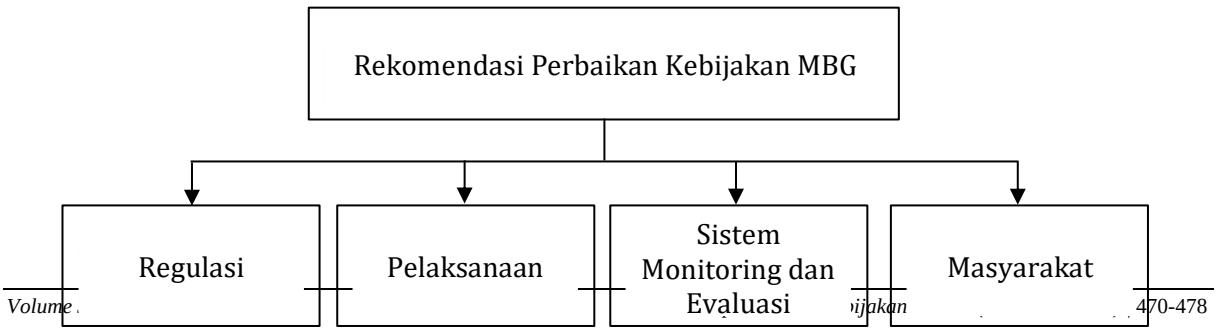
		Proses produksi	Pengawasan kualitas makanan, standar mutu makanan bergizi gratis belum optimal, sehingga sempat terjadi keracunan makanan.
		Proses distribusi	Proses distribusi yang belum optimal yang ditunjukkan keterlambatan distribusi makanan ke sekolah di beberapa daerah, sehingga tidak makanan bergizi gratis tidak sampai tepat waktunya, serta tantangan infrastruktur bagi daerah-daerah terpencil dan susah dijangkau.
		Koordinasi antar pemangku kepentingan	Belum optimalnya koordinasi antar para pemangku kepentingan di lapangan yang secara teknis terlibat dalam produksi dan distribusi makanan bergizi gratis, sehingga peristiwa keracunan, keterlambatan distribusi dan serupa lainnya di daerah tertentu terjadi.
3.	Masyarakat	Promosi kesehatan	Belum optimalnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan kecukupan gizi bagi anak-anak di setiap daerah.
		Keterlibatan UMKM	Belum jelasnya aturan teknis dan rinci bagaimana para pelaku UMKM yang ada di lokasi sekolah untuk terlibat dalam produksi dan distribusi makanan bergizi gratis.
		Keterlibatan instansi sekolah dan orang tua murid	Belum jelasnya aturan bagaimana keikutsertaan lembaga sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan dan produksi makanan bergizi gratis.

Sumber: Analisis Penulis, 2025.

Berdasarkan kepada uraian tersebut dalam tabel tersebut diatas, maka faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan MBG perlu diidentifikasi, dicermati dan dikaji lebih dalam agar memperoleh kejelasan faktor mana yang perlu dicarikan solusinya segera agar proses pelaksanaan kebijakan MBG dapat tetap berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga kebijakan MBG akan berhasil dan memberi dampak yang luas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Rekomendasi Kebijakan MBG di Masa yang Akan Datang

Upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke arah yang lebih baik harus terus dilakukan, hal ini sebagai usaha untuk membangun bangsa Indonesia yang tidak hanya memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga berdaya saing. Kebijakan pemberian makan bergizi sebagai salah satu upaya membangun kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari anak-anak perlu untuk didukung. Berdasarkan kepada uraian sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kebijakan MBG tidak hanya didukung oleh faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBG, tetapi juga terdapat faktor-faktor penghambat yang perlu untuk ditanggulangi dan diselesaikan agar kebijakan MBG dapat dilaksanakan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Melalui artikel ini, maka rekomendasi kebijakan sebagai masukan perbaikan bagi kebijakan MBG dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 1: Rekomendasi Kebijakan MBG
(Analisis Penulis, 2025)

Berdasarkan pada gambar tersebut diatas, maka upaya perbaikan MBG agar lebih baik lagi di masa yang akan datang dibagi ke dalam 4 (empat) aspek utama yaitu aspek regulasi, aspek pelaksanaan, aspek monitoring dan evaluasi dan aspek masyarakat. Adapun uraian lebih rinci tentang keempat aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, aspek regulasi. Aspek regulasi dalam pelaksanaan kebijakan MBG harus bersifat komprehensif mencakup substansi pokok, sinergitas antar peraturan yang ada yang didalamnya mencakup aspek tata kelola, peran aktor pelaksana, mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta bagaimana pengaturan mengenai kontribusi organisasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Peraturan yang menjadi landasan kebijakan MBG hingga saat ini yaitu Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 perihal petunjuk teknis (juknis) operasional MBG. Aturan ini dinilai tidak cukup untuk mengatur kebijakan yang bersifat menyeluruh bagi semua daerah di Indonesia, sehingga perlu adanya aturan lainnya mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang mengatur mengenai kebijakan MBG, sehingga akan memastikan adanya landasan hukum yang kuat sekaligus menjadi jaminan bagi para aktor yang terlibat didalamnya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang ada.

Kedua, aspek pelaksanaan MBG. Proses pelaksanaan MBG menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses yang akan menentukan apakah MBG itu dapat berhasil dilaksanakan atau sebaliknya, setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang terkait dengan pelaksanaan MBG yaitu aktor atau pelaku, proses produksi makanan bergizi gratis dan sistem distribusi. Ketiga aspek tersebut dalam konteks pelaksanaan MBG perlu ditingkatkan dan diperbaharui menjadi lebih baik lagi, hal ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Aspek Terkait Proses Pelaksanaan MBG

No	Aspek	Uraian
1.	Pelaku	Akor-aktor merupakan pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan MBG yang mana para pelaku ini harus memiliki komitmen untuk menyukseskan MBG, dengan begitu para pelaku akan bekerja sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. Peristiwa adanya keracunan makanan, keterlambatan distribusi logistik, bahkan indikasi korupsi tidak akan terjadi apabila para pelaku memiliki komitmen dan berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing (Dirgantara & Carina, 2025a; Singgih et al., 2025), sehingga upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para pelaku MBG perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.
2.	Produksi	Proses produksi MBG dimulai dari penyediaan bahan baku sampai pengemasan MBG sehingga akan menjamin kualitas standar gizi dan higienitas makanan. Adanya keracunan makanan di beberapa daerah menunjukkan bahwa proses produksi belum dilaksanakan dengan baik (Singgih et al., 2025), sehingga perlu upaya perbaikan yang menjamin proses produksi MBG sesuai dengan aturan yang ada.
3.	Distribusi	Pemetaan wilayah dan jaringan distribusi merupakan bagian penting dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBG, adanya keterlambatan pendistribusian makanan bergizi gratis mengindikasikan bahwa proses distribusi belum berjalan dengan baik (Riyanto, 2025), oleh sebab itu perlu adanya optimalisasi sistem pendistribusian guna memastikan ketepatan waktu dalam penyaluran makan bergizi gratis di berbagai daerah, termasuk didalamnya bagi daerah-daerah yang terpencil.

Sumber: Analisis Peneliti, 2025.

Berdasarkan kepada urian tersebut diatas, maka perlu upaya perbaikan dalam aspek pelaksanaan agar tujuan kebijakan MBG mampu diwujudkan sebagaimana rencana awal dan memberikan dampak yang positif baik bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak maupun bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Ketiga, aspek monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kebijakan MBG perlu dilakukan sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didasarkan kepada hal tersebut, maka perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang akan menjamin terealisasinya tujuan kebijakan MBG sebagaimana telah disusun di awal kebijakan dibuat. Sistem monitoring ditujukan guna memastikan aktor atau para pelaku bekerja sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masng, serta memastikan sistem yang ada dapat berjalan dengan baik mulai dari sistem yang mampu menjamin kualitas bahan produk, sistem produksi sampai dengan hasil akhir berupa makanan bergizi yang memiliki kualitas gizi yang terjamin, serta proses distribusi hingga akhir sampai kepada anak-anak yang menjamin ketepatan waktu pemberian makanan bergizi di berbagai tempat.

Evaluasi MBG ditujukan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan dari kebijakan MBG mampu terealisasi, untuk itu diperlukan ukuran atau indikator apa saja untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBG, sehingga akan menjadi patokan bagi pihak-pihak yang terkait untuk menyusun kebijakan selanjutnya di masa yang akan datang. Lebih lanjut, diperlukan kejelasan mengenai evaluator baik dari pihak pemerintah maupun dari eksternal pemerintah guna memastikan bahwa proses penilaian akan berjalan dengan objektif dan memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, aspek masyarakat. Posisi masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek dan objek dari implementasi kebijakan. Pemerintah harus membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat, baik yang berada di lingkungan institusi pendidikan maupun masyarakat lainnya seperti para pelaku UMKM, mulai dari akses untuk penyediaan bahan dasar pangan, keterlibatan dalam produksi makanan bergizi gratis, keterlibatan dalam rantai distribusi makanan bergizi gratis sampai pada keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi kebijakan MBG, sehingga tidak hanya akan menjamin standar gizi makanan yang akan diberikan kepada anak-anak, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang ada di dalamnya berjalan dengan baik, termasuk didalamnya pengawasan penggunaan anggaran sehingga mampu terhindar dari tindakan korupsi.

Keterbukaan terhadap keterlibatan organisasi non pemerintah (NGO) dalam pelaksanaan kebijakan MBG juga perlu untuk dilakukan, baik dalam aspek pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun dalam proses monitoring dan evaluasi. Adanya sistem pengawasan eksternal guna memastikan bahwa kebijakan MBG dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya pengawasan anggaran MBG, sehingga dengan adanya sistem pengawasan eksternal akan menghindari perilaku *fraud* dan tindakan korupsi yang tidak hanya berdampak pada kualitas standar gizi makanan, tetapi juga akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBG secara menyeluruh.

Berdasarkan kepada uraian rekomendasi tersebut di atas, maka diharapkan akan terwujudnya upaya perbaikan kebijakan MBG di masa yang akan datang, sehingga upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kecukupan gizi bagi anak-anak dapat terwujud dan terlaksana secara baik, berkelanjutan dan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke arah yang lebih baik harus terus dilakukan, hal ini sebagai usaha untuk membangun bangsa Indonesia yang tidak hanya memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga berdaya saing. Kebijakan pemberian makan bergizi sebagai salah satu upaya membangun kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari anak-anak perlu untuk didukung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBG yang tengah dilaksanakan di berbagai daerah memunculkan berbagai faktor pendorong dan penghambat. Faktor-faktor pendorong implementasi kebijakan MBG antara lain yaitu faktor kepemimpinan yang baik, dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dan baiknya penerima masyarakat sasaran, sedangkan faktor-faktor

penghambat antar lain yaitu aturan yang belum komprehensif, rantai distribusi makanan yang kaku, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat.
Upaya memperbaiki kebijakan MBG perlu untuk dilakukan agar pelaksanaannya lebih baik lagi di masa yang akan datang yang diharapkan akan sejalan dengan tujuan yang telah disusun di tahap perencanaan kebijakan. Adapun upaya perbaikan kebijakan MBG antara lain meliputi perbaikan regulasi yang harus komprehensif, perbaikan pelaksanaan di lapangan, membangun sistem monitoring dan evaluasi yang jelas, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

REFERENSI

Achmad, N., Mahdum, M., Hosen, M. N., Noor, Z., & Sakwan, S. (2025). *Konsep Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis Dan Penguatan Mustahik*. Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional. https://drive.google.com/file/d/1cuyO-T505IIVfv0WALgkQ0hDGHpc9A73/view

Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru? *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(2), 215–226.

Amani, N. K. (2025). *Anggaran MBG Naik Jadi Rp171 Triliun, Sri Mulyani Beri Tugas Baru ke BI dan OJK*. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5900311/anggaran-mbg-naik-jadi-rp171-triliun-sri-mulyani-beri-tugas-baru-ke-bi-dan-ojk

Andin, A., Risti, D., Latifah, I., Panuntun, M., & Nur, M. (2025). Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, *3*(1), 370–383.

Corebima, Y. A. K. (2025). *Program MBG Jadi Bagian Pendidikan Karakter di Sekolah*. Olenka.Id. https://olenka.id/program-mbg-jadi-bagian-pendidikan-karakter-di-sekolah

Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). Efektivitas Program Makan Gratis Pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis. *Manuju: Malahayati Nursing Journal*, *7*(1), 27–48.

Dirgantara, A., & Carina, J. (2025a). *BGN Klarifikasi KPK soal Anggaran MBG Diutak-atik dari Rp 10.000 Jadi Rp 8.000, Ini Penjelasannya*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2025/03/09/12292591/bgn-klarifikasi-kpk-soal-anggaran-mbg-diutak-atik-dari-rp-10000-jadi-rp-8000

Dirgantara, A., & Carina, Y. (2025b). *Pemda Bakal Sumbang APBD untuk MBG, Tak Wajib bagi Daerah yang Tak Mampu*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/28/18422501/pemda-bakal-sumbang-apbd-untuk-mbg-tak-wajib-bagi-daerah-yang-tak-mampu

Fajri, M. (2024). *Makan Bergizi Gratis, Janji Kampanye Prabowo yang Mau Dijalankan di 2025*. Kumparan.Com. https://kumparan.com/kumparanbisnis/makan-bergizi-gratis-janji-kampanye-prabowo-yang-mau-dijalankan-di-2025-24CS5wxmYy1/full

Imanuel, V. (2025). *Kepala Badan Gizi Nasional Klaim Makan Bergizi Gratis Bisa Atasi Kemiskinan*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/politik/kepala-badan-gizi-nasional-klaim-makan-bergizi-gratis-bisa-atasi-kemiskinan-1162446

Irfani, A. (2025). *Pro Kontra MBG*. Suaramuhammadiyah.Id. https://suaramuhammadiyah.id/read/pro-kontra-mbg

Kemdikbud RI. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyongsong Indonesia Emas 2045*. Https://Bpmpprovsumut.Kemdikbud.Go.Id. https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/program-makan-bergizi-gratis-mbg-menyongsong-indonesia-emas-2045/

Kementerian Sekretariat Negara. (2025). *Antusiasme Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis*. Setneg.Go.Id. https://www.setneg.go.id/baca/index/antusiasme_daerah_dukung_program_makan_bergizi_gratis

Mawangi, G. T. (2025). *Hashim ungkap Prabowo gagas program Makan Bergizi Gratis sejak 2006*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/4620970/hashim-ungkap-prabowo-gagas-program-makan-bergizi-gratis-sejak-2006#google_vignette

Purwowidhu, C. (2025). *Menilik Eksistensi Program MBG atau Makan Bergizi Gratis*. Kemenkeu.Go.Id. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menilik-eksistensi-program-mbg-atau-makan-bergizi-gratis

Rahman, A. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis Persempit Kesenjangan Pangan?* Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5857787/program-makan-bergizi-gratis-persempit-

kesenjangan-pangan
Reyaan, E. M. (2025). *Dinas Pendidikan Pastikan Tetap Dukung MBG di Kabupaten Jayawijaya*. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/makan-bergizi-gratis/1328223/dinas-pendidikan-pastikan-tetap-dukung-mbg-di-kabupaten-jayawijaya
Riyanto. (2025). *MBG di SMPN 5 Ngawi Telat Datang, Siswa Pilih Jajan di Kantin*. Idntimes.Com.
Saptati, R. (2025). *Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimanya*. Kemenkeu.Go.Id.
Sarjito, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pertahanan Negara. *International Journal Administration, Business & Organization*, *5*(5), 129–141.
Singgih, V., Hajid, S., Robert, E., Robert, E., & Inge, N. (2025). *Lini masa dugaan keracunan karena MBG, dari ayam kecap basi hingga daging mentah berdarah – "Perlu evaluasi besar-besaran sebelum jatuh korban jiwa."* Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9vym1gddeno
Soehandoko, J. G. (2024). *Peta Politik DPR 2024-2029: PDIP 110 Kursi Vs KIM Plus 470 Kursi!* Kabar24.Bisnis.Com. https://kabar24.bisnis.com/read/20240826/15/1793969/peta-politik-dpr-2024-2029-pdip-110-kursi-vs-kim-plus-470-kursi
Suryanis, A. (2025). *Kota Surabaya Siapkan Anggaran Rp1 Triliun untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/info-tempo/kota-surabaya-siapkan-anggaran-rp1-triliun-untuk-dukung-program-makan-bergizi-gratis-1196608
Ulya, F. N., & Prabowo, D. (2025). *Pemda Bakal Bantu Danai Makan Bergizi Gratis Rp 5 Triliun*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2025/01/17/20440611/pemda-bakal-bantu-danai-makan-bergizi-gratis-rp-5-triliun